



NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019



NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Umum

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan merupakan kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan

keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019. Selain berpedoman pada beberapa hal tersebut diatas, penyusunan APBD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan setiap tahun, guna memberi arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi termasuk dinamika yang berkembang di tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan dalam memperkuat kondisi ekonomi yang di bangun oleh pemerintah. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh

komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP Tahun 2019 mengusung tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan nasional pemerintah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Sedangkan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yaitu **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”**, untuk prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penanggulan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Tata kelola pemerintahan;
4. Kesenjangan Wilayah;
5. Kualitas hidup dan daya saing Sumber daya manusia;
6. Ketahanan Pangan dan Energi;
7. Pengelolaan Sumber daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah lebih

lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kota Magelang juga harus mengacu pada arah dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menentukan tema pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus mengacu pada arah, strategi dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah. Dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dan provinsi tersebut, tema pembangunan daerah Kota Magelang pada Tahun 2019 adalah **“Produktif bersama Mitra”**. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas.

Berdasarkan tema tersebut, prioritas pembangunan daerah Kota Magelang ialah:

1. Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
2. Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha.
3. Pelembagaan tinjau lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.
4. Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah.
5. Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat daerah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

1. Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya.
2. Pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat.
4. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.
5. Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
6. Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi.
7. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset.
9. Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota.
10. Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah.
11. Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat.
12. Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan.
13. Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan.
14. Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan.
15. Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan.

16. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
17. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender.
18. Pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.
19. Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik.
20. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat.

Untuk prioritas urusan pembangunan Kota Magelang tahun 2019 adalah:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
2. Urusan pendidikan;
3. Urusan kesehatan;
4. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Urusan sosial;
7. Urusan penanaman modal
8. Urusan komunikasi dan informatika;
9. Urusan perdagangan;
10. Urusan perindustrian;
11. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Urusan kebudayaan;
13. Urusan pariwisata;

Sedangkan program unggulan sebagai prioritas pada tahun 2019 adalah:

1. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
2. Program peningkatan daya saing daerah;
3. Program kota cerdas;

4. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
5. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
6. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
7. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
8. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

1.2. Maksud dan Tujuan

Nota Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan serta memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Daerah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 yang merupakan sumber data dan informasi baik dari Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah maupun Anggaran Pembiayaan Daerah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai dasar rencana tahunan keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD serta dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun Nomor 55);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
40. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Nota Keuangan APBD Kota Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
- III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
- IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
- V. Program dan Kegiatan
- VI. Penutup

BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Otonomi daerah telah merubah pola mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan dan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas daerah yang lebih luas. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan dana yang besar sedangkan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pelimpahan pengelolaan keuangan.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat

peran dalam pembiayaan anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri, sehingga pemerintah daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih fokus guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Akan tetapi upaya peningkatan PAD hingga saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur belanja.

Pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD selalu meningkat tiap tahun anggaran, hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan. Ditinjau dari komponen pendapatan daerah, kenaikan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan tahun 2019 nanti diperkirakan akan meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan. Untuk itu perlu upaya guna mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan daerah yang ada.

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah dalam tahun anggaran 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2018
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2016	ANGGARAN TAHUN 2017	ANGGARAN TAHUN 2018 *)
1	PAD	197.465.478	218.085.185	217.823.794
	a. Pajak daerah	24.748.872	29.821.800	30.096.800
	b. Retribusi Daerah	6.001.756	5.422.657	4.780.203
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.181.760	7.710.904	7.458.617
	d. Lain-lain PAD yang Sah	160.533.090	175.129.824	175.488.174
2	Dana Perimbangan	556.101.119	576.667.228	582.806.750
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.017.550	33.063.552	29.517.443
	b. DAU	415.469.412	440.041.244	440.041.244
	c. DAK	111.614.157	103.562.432	113.248.063
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	69.610.678	132.893.466	82.128.757
	a. Pendapatan Hibah		23.985.271	16.768.200
	b. Dana Darurat			
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	55.424.183	51.494.329	47.110.557
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus		47.039.466	18.250.000
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14.186.495	10.374.400	
	Jumlah	823.177.275	927.645.879	882.759.301
	*) <i>Cat. Tahun 2018 data penetapan APBD</i>			

Perkembangan anggaran pendapatan daerah dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp.823.177.275.000,00 pada tahun 2016, naik menjadi Rp.927.645.879.000,00 pada tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.882.759.301.000,00. Adapun Pendapatan Daerah di Kota Magelang terdiri dari komponen pendapatan-pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp.197.465.478.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.218.085.185.000,00. Namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp.217.823.794.000,00.
2. Dana Perimbangan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp.556.101.119.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.576.667.228.000,00. Kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi sehingga menjadi Rp.582.806.750.000,00.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp.69.610.678.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.132.893.466.000,00. Namun pada tahun 2018 turun sehingga menjadi Rp.82.128.757.000,00, dikarenakan belanja bantuan keuangan provinsi belum dialokasikan.

Dari struktur pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar ialah alokasi pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja gaji pegawai. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari PAD guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah sehingga diharapkan mampu mendukung kemandirian daerah dalam menyumbang salah satu komponen Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut harus digali secara maksimal mungkin dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang terhadap masyarakat.

Secara umum permasalahan utama pendapatan daerah Kota Magelang adalah:

1. Belum optimalnya sistem pajak online.
2. *Law enforcement* belum sepenuhnya dijalankan, yaitu denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya.
3. Belum optimalnya penilaian kembali atas tanah dan bangunan.
4. Belum adanya peta zona nilai tanah tahun terbaru sebagai perhitungan nilai pasar.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas terkait dengan rencana penganggaran pendapatan daerah pada tahun 2019 direncanakan sebagaimana dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2019
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2019
1	PAD	236.576.319
	a. Pajak daerah	30.684.300
	b. Retribusi Daerah	4.985.013
	c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.982.607
	d. Lain - lain PAD yang Sah	190.924.399
2	Dana Perimbangan	591.980.659
	a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	26.683.349
	b. Dana Alokasi Umum	440.041.244
	c. Dana Alokasi Khusus	125.256.066
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	75.051.575
	a. Pendapan Hibah	16.757.600
	b. Dana Darurat	
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
	Jumlah	903.608.553

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.903.608.553.000,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp.236.576.319.000,00, Dana Perimbangan sebesar Rp.591.980.659.000,00 dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.75.051.575.000,00.

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ini disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Dalam menentukan target pendapatan, Pemerintah Kota Magelang tetap

memperhatikan faktor-faktor *Non-distorsi* terhadap perekonomian, yaitu hal-hal yang ditimbulkan adanya implikasi pajak atau pungutan yang bisa menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap perekonomian. Selain dana transfer dari pusat, pajak daerah merupakan pendapatan yang menjadi andalan penerimaan pemerintah Kota Magelang. Fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yang pertama Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru juga akan selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak dan retribusi baru perlu mempertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Dalam rangka upaya dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Kota Magelang akan mengupayakan beberapa hal dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan pada Tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada studi potensi yang sudah dibuat bekerja sama dengan Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang.
2. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
3. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

4. Memperkuat proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
5. Melaksanakan tertib administrasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penggunaan *e-tax* (Pajak Online) dalam pelayanan pajak Daerah untuk mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan prosedur melalui sarana teknologi informasi berbasis "*web service*" sehingga Wajib Pajak dapat mengakses pembayaran pajak dengan mudah, murah dan cepat.
7. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
8. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan audit wajib pajak sebagai dasar untuk optimalisasi penerimaan pendapatan melalui laporan keuangan.
9. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Secara lebih terrinci, upaya dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut dilakukan melauai intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Upaya intensifikasi sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem pajak online dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) atau instrumen lain yang dapat digunakan untuk merekam transaksi dalam rangka meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan (*audit*) terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak.

3. Penegakkan *Law Enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
4. Optimalisasi SDM pajak daerah melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
5. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
6. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
7. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB Perdesaan dan Perkotaan
9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
2. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *Tax Based*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
3. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun 2016 terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli tanah.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran yaitu: yang pertama prinsip *kemandirian* yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, yang kedua prinsip *prioritas* yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, dan yang ketiga prinsip *efisiensi dan efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kota Magelang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Magelang tidak menganggarkan belanja subsidi.

- d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/ pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah

pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- 2) pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- 4) pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Untuk mengetahui perkembangan Belanja Daerah Kota Magelang dalam tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 3 sebagaimana berikut:

Tabel 3
Perkembangan Belanja Daerah
Tahun 2016 - 2018
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018 *)
1	Belanja Tidak Langsung	432.348.738	380.992.740	326.136.404
	a. Belanja Pegawai	376.822.627	341.922.387	310.620.578
	b. Belanja Bunga			
	c. Belanja Subsidi			
	d. Belanja Hibah	3.598.396	9.902.833	9.181.194
	e. Belanja Bantuan Sosial	3.791.514	5.834.156	3.556.255
	f. Belanja Bagi Hasil kpd Pemerintah Desa/Kelurahan			
	g. Belanja Bantuan Keu kpd Pemerintah Desa/Kelurahan	641.830	560.703	560.703
	h. Belanja Tidak Terduga	47.494.371	22.772.661	2.217.674
2	Belanja Langsung	585.118.631	694.630.381	643.080.477
	a. Belanja Pegawai	44.510.249	56.182.836	59.263.231
	b. Belanja Barang dan Jasa	294.099.708	366.499.307	360.557.384
	c. Belanja Modal	246.508.674	271.948.238	223.259.862
	Jumlah	1.017.467.369	1.075.623.121	969.216.881
*)	<i>Cat. Tahun 2018 data penetapan APBD</i>			

Perkembangan anggaran Belanja Daerah dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp.1.017.467.369.000,00 pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp.1.075.623.121.000,00 pada tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.969.216.881,00.

Adapun Belanja Daerah tersebut terdiri dari dua komponen belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 mengalami penurunan dari Rp.432.348.738.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.380.992.740.000,00. Kemudian pada tahun 2018 turun lagi menjadi Rp.326.136.404.000,00.
2. Belanja Langsung pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari Rp.585.118.631.000,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.694.630.381.000,00. Namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp.643.080.477.000,00.

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Keterbatasan ruang fiskal yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja yang dialokasikan untuk belanja wajib, maka masih perlu dilakukan langkah langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran belanja yang menumpuk di akhir tahun, pemerintah Kota Magelang sudah berupaya mengembangkan sistem pengelolaan keuangan terintegrasi mulai dari pengalokasian hingga pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien. Dari waktu ke waktu permasalahan utama Belanja Daerah Kota Magelang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang muncul setelah penetapan APBD.
2. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan indikator yang terukur untuk penilaian kinerja Belanja Daerah.
3. Belum optimalnya implementasi Analisa Standar Belanja (ASB) dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
4. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2019 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas.

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja.

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung.

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2019 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

- 1) Besaran anggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta memperhitungkan gaji CPNS.
- 4) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penganggaran tersebut juga

- didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- 5) Penganggaran belanja walikota dan wakil walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional walikota dan wakil walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
 - 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - 7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - 8) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dianggarkan untuk pegawai Pemerintah Kota Magelang yang bekerja pada Perangkat Daerah (PD) yang menangani pelayanan publik dalam bidang perizinan dan non perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 - b) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dianggarkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
 - c) Tambahan penghasilan berdasarkan pengamanan persandian dianggarkan untuk pegawai yang bertugas mengamankan persandian.
- 10) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diperhitungkan sebesar 5% dari target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Belanja Hibah
- Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA Tahun Anggaran 2019 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang (TAPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun Anggaran 2019, anggaran belanja bantuan sosial berupa uang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial tidak terencana. Bantuan sosial tidak terencana dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pencantuman alokasi belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun Anggaran 2019 telah didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh Perangkat Daerah (PD) teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi Perangkat Daerah (PD) serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk mengalokasikan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang Periode 2014 - 2019. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

a. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Standarisasi Harga dan Standar Biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.

b. Dalam merencanakan anggaran suatu kegiatan, PD harus memperhatikan rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, konstruksi dan konsultasi). Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan mengacu pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.
- 2) Pemberian uang lembur bagi PNS dan Non PNS berpedoman pada standar biaya Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019.

e. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Penganggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan mengacu pada standar satuan harga tahun 2019.
- 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai honorer, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- 5) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - 6) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - 7) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - 8) Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memperoleh barang habis pakai/jasa/pemeliharaan tidak dikapitalisasi pada nilai belanja tersebut dan diuraikan ke masing-masing rekening belanja berkenaan.
- f. Belanja Modal
- 1) Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- 3) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 4) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- 5) Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- 7) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
- 8) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Selanjutnya berdasarkan beberapa kebijakan diatas, Pemerintah Kota Magelang merencanakan Belanja Daerah pada Tahun 2019 sebagaimana pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Rencana Belanja Daerah Tahun 2019
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2019
1	Belanja Tidak Langsung	331.776.205
	a. Belanja Pegawai	308.101.649
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Subsidi	-
	d. Belanja Hibah	15.267.670
	e. Belanja Bantuan Sosial	5.092.290
	f. Belanja Bagi Hasil kpd Pemerintah Desa/Kelurahan	
	g. Belanja Bantuan Keu kpd Pemerintah Desa/Kelurahan	560.703
	h. Belanja Tidak Terduga	2.753.893
2	Belanja Langsung	691.832.348
	a. Belanja Pegawai	65.109.185
	b. Belanja Barang dan Jasa	377.046.556
	c. Belanja Modal	249.676.607
	Jumlah	1.023.608.553

Anggaran Belanja Daerah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.1.023.608.553.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.331.776.205.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp.691.832.348.000,00.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 harus berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, serta harus memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019. Prioritas belanja daerah untuk belanja mengikat dan wajib serta kebutuhan belanja operasional di masing-masing Perangkat Daerah dibebankan pada belanja tidak langsung, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk mendanai program dan kegiatan dalam setiap urusan masing-masing Perangkat Daerah dibebankan pada belanja langsung. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 secara rinci dirumuskan sebagaimana tertuang dalam lampiran I sebagai berikut (terlampir):

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Apabila APBD diperkirakan surplus diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Sementara itu, jika APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh, lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Piutang Daerah.
6. Penerimaan Dana Bergulir.
7. Penerimaan Hasil Penarikan.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Namun apabila dalam penyusunan APBD terdapat Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan, maka Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah.
3. Pembayaran Pokok Hutang.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Pemberian Dana bergulir.

Kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai pembiayaan daerah yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan ini, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan Daerah dalam tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Perkembangan Belanja Daerah
Tahun 2016 – 2018
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2016	Tahun2017	Tahun2018 *)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	201.377.094	165.144.899	107.520.354
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	201.227.094	162.344.899	103.642.354
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-
	e. Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	f. Penerimaan Dana Bergulir	150.000	150.000	150.000
	g. Penerimaan Hasil Penarikan	-	2.650.000	3.728.000
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.087.000	17.167.657	21.062.774
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	3.000.000	-
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.087.000	14.167.657	21.062.774
	c. Pembayaran Pokok Hutang			
	d. Pemberian Pinjaman Daerah			
	e. Pemberian Dana Bergulir			
	Pembiayaan Netto	194.290.094	147.977.242	86.457.580

Perkembangan Pembiayaan Netto dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.194.290.094.000,00 turun menjadi sebesar Rp.147.977.242.000,00 pada tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2018 turun lagi menjadi Rp.86.457.580.000,00. Pembiayaan tersebut terdiri dari dua komponen pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan dari Rp.201.377.094.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.165.144.899.000,00 pada tahun 2017 dan kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi Rp.107.520.354.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp.7.087.000.000,00 pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp.17.167.657.000,00 pada tahun 2017. Kemudian naik lagi pada tahun 2018 menjadi Rp.21.062.774.000,00.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Permasalahan utama berkaitan dengan pembiayaan yaitu belum mantapnya ketahanan fiskal daerah, yang berakibat pada aspek pembiayaan daerah khususnya tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah termasuk menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Berusaha meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2019 yang masuk dalam penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2019 tidak dilakukan karena kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang mengalami defisit.

Selanjutnya untuk mengetahui Rencana Pembiayaan Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2019
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2019
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	120.000.000
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120.000.000
	b. Pencairan Dana Cadangan	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
	e. Penerimaan Piutang Daerah	-
	f. Penerimaan Dana Bergulir	-
	g. Penerimaan Hasil Penarikan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-
	b. Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah	-
	c. Pembayaran Pokok Hutang	-
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	-
	e. Pemberian Dana Bergulir	-
	<i>Pembiayaan Netto</i>	120.000.000

Dalam tahun anggaran 2019, dari sisi penerimaan pembiayaan diperkirakan atau diasumsikan sebesar Rp.120.000.000.000,00, dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan tidak ada atau sebesar Rp.0. Berdasarkan kemampuan sumber pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Pembiayaan Netto sebesar Rp.120.000.000.000,00.

Pembiayaan Netto sebesar tersebut diatas digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2019, sehingga tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau sebesar Rp. 0,- (nol).

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka belanja daerah direncanakan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam lampiran II sebagai berikut (terlampir):

BAB VI

PENUTUP

Demikian gambaran ringkas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 yang merupakan salah satu bentuk sarana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang merupakan program kerja Kota Magelang adalah tanggung jawab kita bersama.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan APBD ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayat serta inayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Magelang, September 2018

WALIKOTA MAGELANG


Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



LAMPIRAN I
NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I

NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Belanja
1	2	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	453.836.141.000,00
101	Pendidikan	51.367.047.000,00
101,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.367.047.000,00
101.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.367.047.000,00
101.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.231.366.000,00
101.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	668.430.000,00
101.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	126.186.000,00
101.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	779.307.000,00
101.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.624.009.000,00
101.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	840.618.000,00
101.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.466.631.000,00
101.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.715.166.000,00
101.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.033.407.000,00
101.01.01.25	Program Pendidikan Berkelanjutan	150.700.000,00
101.01.01.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.757.600.000,00
101.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.033.349.000,00
101.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	671.505.000,00
101.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	617.945.000,00
101.01.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	441.395.000,00
101.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	63.246.000,00
101.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	146.187.000,00
102	Kesehatan	298.814.729.000,00
102,01	Dinas Kesehatan	43.507.118.000,00
102.01.01	Dinas Kesehatan	43.507.118.000,00
102.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.880.549.000,00
102.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	607.776.000,00
102.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	44.452.000,00
102.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	64.025.000,00
102.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.199.397.000,00
102.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	23.577.749.000,00
102.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	176.392.000,00
102.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	615.490.000,00
102.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	530.846.000,00
102.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	157.044.000,00
102.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.229.099.000,00
102.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.852.472.000,00
102.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	12.348.000,00
102.01.01.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	52.375.000,00
102.01.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	109.463.000,00
102.01.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	138.425.000,00
102.01.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	54.563.000,00
102.01.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.307.995.000,00
102.01.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	6.896.658.000,00
102,02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	255.307.611.000,00
102.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	255.307.611.000,00
102.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit t	80.307.611.000,00
102.02.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	175.000.000.000,00
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.281.490.000,00
103,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.281.490.000,00
103.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.281.490.000,00
103.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.329.584.000,00
103.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9.805.440.000,00
103.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	102.290.000,00
103.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.110.000.000,00
103.01.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	492.000.000,00
103.01.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.257.954.000,00

103.01.01.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	14.019.000,00
103.01.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	82.000.000,00
103.01.01.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1.715.000.000,00
103.01.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	20.787.069.000,00
103.01.01.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	128.521.000,00
103.01.01.33	Program pengawasan jasa konstruksi	482.388.000,00
103.01.01.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	6.638.825.000,00
103.01.01.52	Program Perencanaan Tata Ruang	869.269.000,00
103.01.01.53	Program Pemanfaatan Ruang	234.990.000,00
103.01.01.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	207.141.000,00
103.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	25.000.000,00
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.187.533.000,00
104,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	26.187.533.000,00
104.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	26.187.533.000,00
104.01.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	134.588.000,00
104.01.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	782.948.000,00
104.01.01.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	560.700.000,00
104.01.01.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	1.260.150.000,00
104.01.01.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	850.050.000,00
104.01.01.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	1.688.500.000,00
104.01.01.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	763.150.000,00
104.01.01.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	641.100.000,00
104.01.01.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	490.850.000,00
104.01.01.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	493.300.000,00
104.01.01.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	368.900.000,00
104.01.01.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	1.948.975.000,00
104.01.01.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemiriorejo	390.040.000,00
104.01.01.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	688.550.000,00
104.01.01.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	433.000.000,00
104.01.01.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	93.500.000,00
104.01.01.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	575.050.000,00
104.01.01.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	628.500.000,00
104.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.099.000,00
104.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	348.804.000,00
104.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	11.784.000,00
104.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	40.000.000,00
104.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	118.054.000,00
104.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	4.225.427.000,00
104.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.114.176.000,00
104.01.01.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	42.810.000,00
104.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5.702.628.000,00
104.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.900.000,00
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.152.144.000,00
105,01	Satuan Polisi Pamong Praja	7.562.970.000,00
105.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7.562.970.000,00
105.01.01.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.165.331.000,00
105.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	623.284.000,00
105.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	850.729.000,00
105.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	64.776.000,00
105.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.724.000,00
105.01.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.060.620.000,00
105.01.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	113.535.000,00
105.01.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	268.627.000,00
105.01.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	209.344.000,00
105.01.01.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	173.000.000,00
105,02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.589.174.000,00
105.02.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.589.174.000,00
105.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	515.457.000,00
105.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	203.885.000,00
105.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.695.000,00
105.02.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.140.073.000,00
105.02.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	191.997.000,00
105.02.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	267.435.000,00
105.02.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	57.780.000,00
105.02.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	146.771.000,00
105.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	13.081.000,00

106	Sosial	3.033.198.000,00
106,01	Dinas Sosial	3.033.198.000,00
106.01.01	Dinas Sosial	3.033.198.000,00
106.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	28.168.000,00
106.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468.556.000,00
106.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	174.460.000,00
106.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	134.539.000,00
106.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	117.139.000,00
106.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.113.368.000,00
106.01.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	136.038.000,00
106.01.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	13.076.000,00
106.01.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	128.063.000,00
106.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	719.791.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	92.639.021.000,00
201	Tenaga Kerja	5.665.238.000,00
201,01	Dinas Tenaga Kerja	5.665.238.000,00
201.01.01	Dinas Tenaga Kerja	5.665.238.000,00
201.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	586.461.000,00
201.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	167.051.000,00
201.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.483.000,00
201.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.058.516.000,00
201.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.457.969.000,00
201.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	217.667.000,00
201.01.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	104.009.000,00
201.01.01.17	Program Transmigrasi Regional	33.082.000,00
205	Lingkungan Hidup	40.247.417.000,00
205,01	Dinas Lingkungan Hidup	40.247.417.000,00
205.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	40.247.417.000,00
205.01.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	880.610.000,00
205.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.000.000.000,00
205.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.707.811.000,00
205.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.684.578.000,00
205.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	351.321.000,00
205.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	104.850.000,00
205.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	127.845.000,00
205.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.572.576.000,00
205.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	912.873.000,00
205.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	407.900.000,00
205.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	859.875.000,00
205.01.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	27.867.000,00
205.01.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.354.033.000,00
205.01.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.255.278.000,00
206	Administrasi Kependudukan dan Capil	2.693.559.000,00
206,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.693.559.000,00
206.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.693.559.000,00
206.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621.307.000,00
206.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	361.545.000,00
206.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.547.000,00
206.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.629.470.000,00
206.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.690.000,00
207	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.886.927.000,00
207,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.886.927.000,00
207.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.886.927.000,00
207.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.864.000,00
207.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	196.682.000,00
207.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.783.000,00
207.01.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	103.897.000,00
207.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	592.772.000,00
207.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	40.903.000,00
207.01.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	167.876.000,00
207.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.967.000,00
207.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	347.124.000,00
207.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.600.000,00
207.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.238.000,00
207.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	178.758.000,00

207.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	45.000.000,00
207.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	463.936.000,00
207.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	507.600.000,00
207.01.01.15	Program Keluarga Berencana	969.578.000,00
207.01.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000,00
207.01.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	61.659.000,00
207.01.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	181.890.000,00
207.01.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	43.536.000,00
207.01.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.796.000,00
207.01.01.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	120.686.000,00
209	Perhubungan	7.028.212.000,00
209,01	Dinas Perhubungan	7.028.212.000,00
209.01.01	Dinas Perhubungan	7.028.212.000,00
209.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.170.000,00
209.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	444.093.000,00
209.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	35.076.000,00
209.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92.501.000,00
209.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	557.876.000,00
209.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	354.224.000,00
209.01.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	682.872.000,00
209.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	702.495.000,00
209.01.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.981.444.000,00
209.01.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	233.461.000,00
210	Komunikasi dan Informatika	12.557.764.000,00
210,01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	12.557.764.000,00
210.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	12.557.764.000,00
210.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.841.702.000,00
210.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	424.697.000,00
210.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61.321.000,00
210.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.486.872.000,00
210.01.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	381.362.000,00
210.01.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	306.792.000,00
210.01.01.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	5.166.806.000,00
210.01.01.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	245.518.000,00
210.01.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	417.089.000,00
210.01.01.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	142.144.000,00
210.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	83.461.000,00
212	Penanaman Modal	2.846.450.000,00
212,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.846.450.000,00
212.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.846.450.000,00
212.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.583.000,00
212.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	845.653.000,00
212.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	135.357.000,00
212.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	14.000.000,00
212.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696.200.000,00
212.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	311.480.000,00
212.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.080.000,00
212.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.900.000,00
212.01.01.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	664.597.000,00
212.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	105.600.000,00
213	Kepemudaan dan Olah Raga	12.667.018.000,00
213,01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	12.667.018.000,00
213.01.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata	12.667.018.000,00
213.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905.267.000,00
213.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	406.321.000,00
213.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.400.000,00
213.01.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	35.031.000,00
213.01.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.316.172.000,00
213.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.541.784.000,00
213.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.504.482.000,00
213.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.621.058.000,00
213.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	150.233.000,00
213.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	91.270.000,00
217	Perpustakaan	4.046.436.000,00
217,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.046.436.000,00
217.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.046.436.000,00

217.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.058.495.000,00
217.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	552.667.000,00
217.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.681.000,00
217.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.439.847.000,00
217.01.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	36.616.000,00
217.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	655.744.000,00
217.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	104.085.000,00
217.01.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	151.301.000,00
3	Urusan Pilihan	27.372.401.000,00
303	Pertanian	6.449.412.000,00
303,01	Dinas Pertanian dan Pangan	6.449.412.000,00
303.01.01	Dinas Pertanian dan Pangan	6.449.412.000,00
303.01.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	444.789.000,00
303.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.006.380.000,00
303.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	32.310.000,00
303.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	382.704.000,00
303.01.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	271.801.000,00
303.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	828.968.000,00
303.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	373.587.000,00
303.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	5.738.000,00
303.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	82.335.000,00
303.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	498.650.000,00
303.01.01.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	373.421.000,00
303.01.01.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	180.132.000,00
303.01.01.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	503.586.000,00
303.01.01.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	84.987.000,00
303.01.01.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	433.821.000,00
303.01.01.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	11.483.000,00
303.01.01.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	248.262.000,00
303.01.01.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	59.859.000,00
303.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	626.599.000,00
307	Perindustrian	20.922.989.000,00
307,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.922.989.000,00
307.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.922.989.000,00
307.01.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	177.645.000,00
307.01.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	95.603.000,00
307.01.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	545.864.000,00
307.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	195.528.000,00
307.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	22.232.000,00
307.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	2.244.161.000,00
307.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.237.000,00
307.01.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	999.240.000,00
307.01.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	766.373.000,00
307.01.01.20	Program Pengelolaan Pasar	7.761.057.000,00
307.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.783.518.000,00
307.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	599.602.000,00
307.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	167.104.000,00
307.01.01.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	40.392.000,00
307.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	782.315.000,00
307.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	9.865.000,00
307.01.01.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	4.725.253.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	117.984.785.000,00
401	Administrasi Pemerintahan	70.771.471.000,00
401,01	DPRD	0,00
401.01.01	DPRD	0,00
401,02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
401.02.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
401,03	Sekretariat Daerah	27.138.701.000,00
401.03.01	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	2.581.681.000,00
401.03.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	150.235.000,00
401.03.01.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	169.888.000,00
401.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.078.000,00
401.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.855.000,00
401.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	33.629.000,00
401.03.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.064.245.000,00
401.03.01.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	577.383.000,00

401.03.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	117.202.000,00
401.03.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	331.166.000,00
401.03.02	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	986.515.000,00
401.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.050.000,00
401.03.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.751.000,00
401.03.02.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	211.640.000,00
401.03.02.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	275.770.000,00
401.03.02.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	273.150.000,00
401.03.02.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	80.933.000,00
401.03.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.221.000,00
401.03.03	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	1.974.934.000,00
401.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.713.000,00
401.03.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	11.870.000,00
401.03.03.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.879.351.000,00
401.03.04	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian	1.445.227.000,00
401.03.04.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	129.100.000,00
401.03.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	125.602.000,00
401.03.04.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	166.061.000,00
401.03.04.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	129.083.000,00
401.03.04.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	87.909.000,00
401.03.04.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	140.794.000,00
401.03.04.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	288.975.000,00
401.03.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172.213.000,00
401.03.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9.784.000,00
401.03.04.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	145.310.000,00
401.03.04.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	50.396.000,00
401.03.05	Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan	2.217.024.000,00
401.03.05.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	614.261.000,00
401.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.220.000,00
401.03.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.030.000,00
401.03.05.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	42.272.000,00
401.03.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	24.456.000,00
401.03.05.16	Program Kerjasama Pembangunan	535.858.000,00
401.03.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	776.473.000,00
401.03.05.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	103.454.000,00
401.03.06	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.489.126.000,00
401.03.06.18	Program Pendidikan Non Formal	511.389.000,00
401.03.06.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.418.000,00
401.03.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	86.575.000,00
401.03.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	322.216.000,00
401.03.06.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	58.867.000,00
401.03.06.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	778.919.000,00
401.03.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	66.323.000,00
401.03.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	209.343.000,00
401.03.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	40.961.000,00
401.03.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	55.626.000,00
401.03.06.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	197.545.000,00
401.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	126.534.000,00
401.03.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8.410.000,00
401.03.07	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat	3.515.765.000,00
401.03.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	128.149.000,00
401.03.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.570.823.000,00
401.03.07.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	192.467.000,00
401.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.075.000,00
401.03.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	37.456./000,00
401.03.07.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	221.898.000,00
401.03.07.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	122.897.000,00
401.03.08	Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	4.469.320.000,00
401.03.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.858.833.000,00
401.03.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.400.837.000,00
401.03.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209.650.000,00
401.03.09	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	7.459.109.000,00
401.03.09.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	92.700.000,00
401.03.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.098.170.000,00
401.03.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	328.155.000,00

401.03.09.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.940.084.000,00
401,04	Sekretariat DPRD	21.058.923.000,00
401.04.01	Sekretariat DPRD	21.058.923.000,00
401.04.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	115.956.000,00
401.04.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	166.900.000,00
401.04.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	35.111.000,00
401.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.868.665.000,00
401.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	565.217.000,00
401.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	359.862.000,00
401.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	790.800.000,00
401.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.753.000,00
401.04.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12.055.223.000,00
401.04.01.15	Program Pengembangan data/informasi	40.436.000,00
401,05	Kecamatan Magelang Selatan	6.943.987.000,00
401.05.01	Kecamatan Magelang Selatan	1.434.669.000,00
401.05.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10.533.000,00
401.05.01.18	Program Pendidikan Non Formal	34.459.000,00
401.05.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.359.000,00
401.05.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	12.754.000,00
401.05.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	9.359.000,00
401.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	89.524.000,00
401.05.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	30.146.000,00
401.05.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	16.428.000,00
401.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	9.355.000,00
401.05.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	9.206.000,00
401.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	45.787.000,00
401.05.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	14.350.000,00
401.05.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	10.027.000,00
401.05.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	10.131.000,00
401.05.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	23.630.000,00
401.05.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	7.272.000,00
401.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.235.000,00
401.05.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	45.000.000,00
401.05.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	6.287.000,00
401.05.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4.281.000,00
401.05.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	28.406.000,00
401.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	700.394.000,00
401.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	198.759.000,00
401.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.282.000,00
401.05.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.705.000,00
401.05.02	Kelurahan Jurangombo Selatan	888.007.000,00
401.05.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.508.000,00
401.05.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.746.000,00
401.05.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	15.180.000,00
401.05.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.922.000,00
401.05.02.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	110.200.000,00
401.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.216.000,00
401.05.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	135.863.000,00
401.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	29.050.000,00
401.05.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.200.000,00
401.05.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	95.218.000,00
401.05.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.245.000,00
401.05.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.780.000,00
401.05.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	71.893.000,00
401.05.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	23.338.000,00
401.05.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	15.657.000,00
401.05.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.030.000,00
401.05.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.047.000,00
401.05.02.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	31.863.000,00
401.05.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	12.410.000,00
401.05.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	23.765.000,00
401.05.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.449.000,00
401.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.763.000,00
401.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	53.538.000,00
401.05.02.15	Program Pengembangan data/informasi	2.784.000,00
401.05.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.480.000,00

401.05.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	18.862.000,00
401.05.03	Kelurahan Jurangombo Utara	752.591.000,00
401.05.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.421.000,00
401.05.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.714.000,00
401.05.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	7.475.000,00
401.05.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10.525.000,00
401.05.03.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	97.831.000,00
401.05.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.475.000,00
401.05.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	115.026.000,00
401.05.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	19.011.000,00
401.05.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	8.024.000,00
401.05.03.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	10.500.000,00
401.05.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	84.602.000,00
401.05.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.626.000,00
401.05.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.521.000,00
401.05.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	65.760.000,00
401.05.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	12.440.000,00
401.05.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	8.253.000,00
401.05.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.152.000,00
401.05.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	13.100.000,00
401.05.03.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	31.336.000,00
401.05.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	11.250.000,00
401.05.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	20.774.000,00
401.05.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5.101.000,00
401.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.865.000,00
401.05.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	47.958.000,00
401.05.03.15	Program Pengembangan data/informasi	3.761.000,00
401.05.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.976.000,00
401.05.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	9.114.000,00
401.05.04	Kelurahan Magersari	972.953.000,00
401.05.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.051.000,00
401.05.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.660.000,00
401.05.04.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.237.000,00
401.05.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.280.000,00
401.05.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.973.000,00
401.05.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.824.000,00
401.05.04.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	68.900.000,00
401.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.210.000,00
401.05.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	225.137.000,00
401.05.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.902.000,00
401.05.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	11.590.000,00
401.05.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	103.559.000,00
401.05.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.681.000,00
401.05.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	28.403.000,00
401.05.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	67.709.000,00
401.05.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	13.280.000,00
401.05.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	10.566.000,00
401.05.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.120.000,00
401.05.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	10.244.000,00
401.05.04.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	15.986.000,00
401.05.04.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	29.957.000,00
401.05.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	41.110.000,00
401.05.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	22.463.000,00
401.05.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.194.000,00
401.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.407.000,00
401.05.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27.712.000,00
401.05.04.15	Program Pengembangan data/informasi	1.962.000,00
401.05.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.126.000,00
401.05.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	19.710.000,00
401.05.05	Kelurahan Rejowinangun Selatan	949.098.000,00
401.05.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10.648.000,00
401.05.05.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.522.000,00
401.05.05.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	18.200.000,00
401.05.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	8.373.000,00
401.05.05.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	9.114.000,00
401.05.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	14.170.000,00

401.05.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	7.766.000,00
401.05.05.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	6.425.000,00
401.05.05.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	111.675.000,00
401.05.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.021.000,00
401.05.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	185.223.000,00
401.05.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	35.061.000,00
401.05.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	5.217.000,00
401.05.05.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	5.987.000,00
401.05.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	8.800.000,00
401.05.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	53.418.000,00
401.05.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.191.000,00
401.05.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5.300.000,00
401.05.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	75.855.000,00
401.05.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	19.382.000,00
401.05.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	30.510.000,00
401.05.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.05.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.565.000,00
401.05.05.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	32.197.000,00
401.05.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	15.935.000,00
401.05.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	37.739.000,00
401.05.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.370.000,00
401.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.972.000,00
401.05.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	28.566.000,00
401.05.05.15	Program Pengembangan data/informasi	6.931.000,00
401.05.05.16	Program Kerjasama Pembangunan	9.142.000,00
401.05.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.989.000,00
401.05.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12.834.000,00
401.05.06	Kelurahan Tidar Selatan	907.001.000,00
401.05.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.128.000,00
401.05.06.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	33.000.000,00
401.05.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	10.490.000,00
401.05.06.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	76.294.000,00
401.05.06.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	123.250.000,00
401.05.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.445.000,00
401.05.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	140.084.000,00
401.05.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	32.928.000,00
401.05.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	9.035.000,00
401.05.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	57.090.000,00
401.05.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.040.000,00
401.05.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	93.716.000,00
401.05.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	14.289.000,00
401.05.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	28.633.000,00
401.05.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.663.000,00
401.05.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	11.415.000,00
401.05.06.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18.014.000,00
401.05.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	17.955.000,00
401.05.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	12.624.000,00
401.05.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.360.000,00
401.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136.987.000,00
401.05.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	29.417.000,00
401.05.06.15	Program Pengembangan data/informasi	2.812.000,00
401.05.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.712.000,00
401.05.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	10.620.000,00
401.05.07	Kelurahan Tidar Utara	1.039.668.000,00
401.05.07.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.583.000,00
401.05.07.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	44.070.000,00
401.05.07.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.680.000,00
401.05.07.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	308.000.000,00
401.05.07.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.365.000,00
401.05.07.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	162.020.000,00
401.05.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	27.280.000,00
401.05.07.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.200.000,00
401.05.07.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	38.160.000,00
401.05.07.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.704.000,00
401.05.07.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.184.000,00
401.05.07.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	69.036.000,00

401.05.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	17.609.000,00
401.05.07.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	17.160.000,00
401.05.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.880.000,00
401.05.07.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.350.000,00
401.05.07.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	24.604.000,00
401.05.07.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	11.380.000,00
401.05.07.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.981.000,00
401.05.07.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2.898.000,00
401.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.767.000,00
401.05.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.991.000,00
401.05.07.15	Program Pengembangan data/informasi	20.058.000,00
401.05.07.21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.639.000,00
401.05.07.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan	11.069.000,00
401,06	Kecamatan Magelang Tengah	8.142.530.000,00
401.06.01	Kecamatan Magelang Tengah	2.390.135.000,00
401.06.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	23.410.000,00
401.06.01.18	Program Pendidikan Non Formal	50.727.000,00
401.06.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.505.000,00
401.06.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	60.000.000,00
401.06.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	37.664.000,00
401.06.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	129.659.000,00
401.06.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	34.337.000,00
401.06.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.621.000,00
401.06.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	8.984.000,00
401.06.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14.764.000,00
401.06.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	22.303.000,00
401.06.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	15.432.000,00
401.06.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	46.937.000,00
401.06.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	64.218.000,00
401.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	14.513.000,00
401.06.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	44.860.000,00
401.06.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	24.036.000,00
401.06.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	125.375.000,00
401.06.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	19.082.000,00
401.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.988.000,00
401.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	956.175.000,00
401.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	275.314.000,00
401.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	10.837.000,00
401.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.820.000,00
401.06.01.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	234.368.000,00
401.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	29.206.000,00
401.06.02	Kelurahan Cacaban	1.031.518.000,00
401.06.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	8.470.000,00
401.06.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.257.000,00
401.06.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	15.730.000,00
401.06.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	18.150.000,00
401.06.02.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	73.164.000,00
401.06.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.040.000,00
401.06.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	200.271.000,00
401.06.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	7.910.000,00
401.06.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	8.360.000,00
401.06.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6.050.000,00
401.06.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	15.730.000,00
401.06.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	79.659.000,00
401.06.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.396.000,00
401.06.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	7.260.000,00
401.06.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	27.323.000,00
401.06.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	17.675.000,00
401.06.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	14.214.000,00
401.06.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.388.000,00
401.06.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.050.000,00
401.06.02.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	18.150.000,00
401.06.02.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	7.460.000,00
401.06.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	33.880.000,00
401.06.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	11.796.000,00
401.06.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3.160.000,00

401.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.575.000,00
401.06.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	219.880.000,00
401.06.02.15	Program Pengembangan data/informasi	3.630.000,00
401.06.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah	19.360.000,00
401.06.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	12.530.000,00
401.06.03	Kelurahan Gelangan	907.702.000,00
401.06.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.228.000,00
401.06.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.306.000,00
401.06.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	17.140.000,00
401.06.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8.117.000,00
401.06.03.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	178.788.000,00
401.06.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.560.000,00
401.06.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	162.210.000,00
401.06.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	8.823.000,00
401.06.03.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	4.465.000,00
401.06.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.152.000,00
401.06.03.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	8.052.000,00
401.06.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	75.301.000,00
401.06.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.400.000,00
401.06.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5.653.000,00
401.06.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	27.729.000,00
401.06.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	28.420.000,00
401.06.03.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	10.202.000,00
401.06.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.06.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.120.000,00
401.06.03.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21.918.000,00
401.06.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	6.610.000,00
401.06.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	29.772.000,00
401.06.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.373.000,00
401.06.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.684.000,00
401.06.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164.115.000,00
401.06.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	46.382.000,00
401.06.03.15	Program Pengembangan data/informasi	2.469.000,00
401.06.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	17.762.000,00
401.06.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	17.951.000,00
401.06.04	Kelurahan Kemirirejo	925.904.000,00
401.06.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.479.000,00
401.06.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9.463.000,00
401.06.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	30.983.000,00
401.06.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	45.648.000,00
401.06.04.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	83.980.000,00
401.06.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.573.000,00
401.06.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	175.532.000,00
401.06.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	8.828.000,00
401.06.04.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.806.000,00
401.06.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	7.808.000,00
401.06.04.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	11.338.000,00
401.06.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	124.881.000,00
401.06.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.475.000,00
401.06.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.797.000,00
401.06.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.113.000,00
401.06.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	25.818.000,00
401.06.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	9.732.000,00
401.06.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.080.000,00
401.06.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.160.000,00
401.06.04.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	19.362.000,00
401.06.04.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	7.742.000,00
401.06.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	37.814.000,00
401.06.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.870.000,00
401.06.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5.847.000,00
401.06.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	129.599.000,00
401.06.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	41.069.000,00
401.06.04.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	19.632.000,00
401.06.04.15	Program Pengembangan data/informasi	3.801.000,00
401.06.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.076.000,00
401.06.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	19.598.000,00

401.06.05	Kelurahan Magelang	864.318.000,00
401.06.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.823.000,00
401.06.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.361.000,00
401.06.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	12.750.000,00
401.06.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	13.860.000,00
401.06.05.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	107.668.000,00
401.06.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.250.000,00
401.06.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	154.121.000,00
401.06.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	10.439.000,00
401.06.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	7.857.000,00
401.06.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10.605.000,00
401.06.05.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	5.654.000,00
401.06.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	127.607.000,00
401.06.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.150.000,00
401.06.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	7.370.000,00
401.06.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	25.537.000,00
401.06.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	24.242.000,00
401.06.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	9.124.000,00
401.06.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.330.000,00
401.06.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	12.490.000,00
401.06.05.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	21.562.000,00
401.06.05.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	8.334.000,00
401.06.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	25.123.000,00
401.06.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	21.310.000,00
401.06.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2.601.000,00
401.06.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.928.000,00
401.06.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	46.986.000,00
401.06.05.15	Program Pengembangan data/informasi	2.285.000,00
401.06.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	13.120.000,00
401.06.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	10.831.000,00
401.06.06	Kelurahan Panjang	733.958.000,00
401.06.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.480.000,00
401.06.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.711.000,00
401.06.06.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	21.600.000,00
401.06.06.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.200.000,00
401.06.06.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	55.681.000,00
401.06.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.125.000,00
401.06.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	157.608.000,00
401.06.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	7.685.000,00
401.06.06.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3.711.000,00
401.06.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3.657.000,00
401.06.06.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	5.353.000,00
401.06.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	132.678.000,00
401.06.06.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.348.000,00
401.06.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.010.000,00
401.06.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.665.000,00
401.06.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	14.106.000,00
401.06.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	4.872.000,00
401.06.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.624.000,00
401.06.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.751.000,00
401.06.06.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	17.645.000,00
401.06.06.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	5.235.000,00
401.06.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	24.990.000,00
401.06.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	7.344.000,00
401.06.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.177.000,00
401.06.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.416.000,00
401.06.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23.524.000,00
401.06.06.15	Program Pengembangan data/informasi	2.223.000,00
401.06.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.463.000,00
401.06.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	7.076.000,00
401.06.07	Kelurahan Rejowinangun Utara	1.288.995.000,00
401.06.07.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.150.000,00
401.06.07.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	7.601.000,00
401.06.07.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	35.960.000,00
401.06.07.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10.425.000,00
401.06.07.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	224.685.000,00

401.06.07.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	41.594.000,00
401.06.07.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	249.559.000,00
401.06.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	14.971.000,00
401.06.07.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	5.657.000,00
401.06.07.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	9.191.000,00
401.06.07.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	25.549.000,00
401.06.07.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	51.960.000,00
401.06.07.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.060.000,00
401.06.07.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.976.000,00
401.06.07.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	36.508.000,00
401.06.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	33.220.000,00
401.06.07.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	11.630.000,00
401.06.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.543.000,00
401.06.07.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.197.000,00
401.06.07.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	49.904.000,00
401.06.07.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	10.610.000,00
401.06.07.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	67.083.000,00
401.06.07.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	21.796.000,00
401.06.07.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.675.000,00
401.06.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.240.000,00
401.06.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	67.202.000,00
401.06.07.15	Program Pengembangan data/informasi	7.756.000,00
401.06.07.21	Program perencanaan pembangunan daerah	29.423.000,00
401.06.07.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	40.870.000,00
401,07	Kecamatan Magelang Utara	7.487.330.000,00
401.07.01	Kecamatan Magelang Utara	1.924.759.000,00
401.07.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	27.425.000,00
401.07.01.18	Program Pendidikan Non Formal	37.093.000,00
401.07.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.876.000,00
401.07.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	10.952.000,00
401.07.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	59.993.000,00
401.07.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.939.000,00
401.07.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	116.499.000,00
401.07.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	27.342.000,00
401.07.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	11.879.000,00
401.07.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	7.337.000,00
401.07.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10.421.000,00
401.07.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	72.604.000,00
401.07.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	52.121.000,00
401.07.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	124.038.000,00
401.07.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000,00
401.07.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	32.644.000,00
401.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.000.000,00
401.07.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	46.342.000,00
401.07.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	13.332.000,00
401.07.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	16.739.000,00
401.07.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.355.000,00
401.07.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.212.000,00
401.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.209.000,00
401.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93.113.000,00
401.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	148.548.000,00
401.07.01.15	Program Pengembangan data/informasi	4.712.000,00
401.07.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	22.092.000,00
401.07.02	Kelurahan Kedungsari	1.276.351.000,00
401.07.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.015.000,00
401.07.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.278.000,00
401.07.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.557.000,00
401.07.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	8.302.000,00
401.07.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	15.360.000,00
401.07.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	8.007.000,00
401.07.02.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	329.833.000,00
401.07.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.869.000,00
401.07.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	173.838.000,00
401.07.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	30.683.000,00
401.07.02.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	4.460.000,00
401.07.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6.471.000,00

401.07.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	5.886.000,00
401.07.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	72.843.000,00
401.07.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.599.000,00
401.07.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	196.941.000,00
401.07.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.488.000,00
401.07.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	32.172.000,00
401.07.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	8.919.000,00
401.07.02.15	Program Keluarga Berencana	12.021.000,00
401.07.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.07.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.452.000,00
401.07.02.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	31.651.000,00
401.07.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	19.050.000,00
401.07.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	9.412.000,00
401.07.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3.417.000,00
401.07.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.139.000,00
401.07.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	37.145.000,00
401.07.02.15	Program Pengembangan data/informasi	4.986.000,00
401.07.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah	24.457.000,00
401.07.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	18.100.000,00
401.07.03	Kelurahan Kramat Selatan	1.163.965.000,00
401.07.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.000.000,00
401.07.03.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8.500.000,00
401.07.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.000.000,00
401.07.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	14.000.000,00
401.07.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	8.000.000,00
401.07.03.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	10.000.000,00
401.07.03.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	26.500.000,00
401.07.03.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	257.700.000,00
401.07.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	25.000.000,00
401.07.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	161.980.000,00
401.07.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	31.000.000,00
401.07.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	7.500.000,00
401.07.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	156.022.000,00
401.07.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	7.500.000,00
401.07.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.000.000,00
401.07.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	28.516.000,00
401.07.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	29.000.000,00
401.07.03.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	16.500.000,00
401.07.03.15	Program Keluarga Berencana	11.000.000,00
401.07.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.07.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.500.000,00
401.07.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	25.000.000,00
401.07.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	14.000.000,00
401.07.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	11.660.000,00
401.07.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	9.000.000,00
401.07.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	168.570.000,00
401.07.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49.017.000,00
401.07.03.15	Program Pengembangan data/informasi	2.500.000,00
401.07.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	26.000.000,00
401.07.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	24.000.000,00
401.07.04	Kelurahan Kramat Utara	961.290.000,00
401.07.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.918.000,00
401.07.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.680.000,00
401.07.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.720.000,00
401.07.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.289.000,00
401.07.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	13.724.000,00
401.07.04.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.951.000,00
401.07.04.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	34.669.000,00
401.07.04.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	130.443.000,00
401.07.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.833.000,00
401.07.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	133.904.000,00
401.07.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	31.581.000,00
401.07.04.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	5.191.000,00
401.07.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	7.549.000,00
401.07.04.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.314.000,00
401.07.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	148.044.000,00

401.07.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.997.000,00
401.07.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	12.072.000,00
401.07.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	24.861.000,00
401.07.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	19.134.000,00
401.07.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	12.538.000,00
401.07.04.15	Program Keluarga Berencana	3.775.000,00
401.07.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.07.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3.965.000,00
401.07.04.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	23.780.000,00
401.07.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	30.599.000,00
401.07.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	9.402.000,00
401.07.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3.262.000,00
401.07.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.464.000,00
401.07.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	72.573.000,00
401.07.04.15	Program Pengembangan data/informasi	4.934.000,00
401.07.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.754.000,00
401.07.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	22.370.000,00
401.07.05	Kelurahan Potrobangsari	1.012.096.000,00
401.07.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.610.000,00
401.07.05.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.324.000,00
401.07.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.773.000,00
401.07.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.665.000,00
401.07.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	5.316.000,00
401.07.05.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	12.405.000,00
401.07.05.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	207.133.000,00
401.07.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	17.040.000,00
401.07.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	173.388.000,00
401.07.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	29.740.000,00
401.07.05.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	4.964.000,00
401.07.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6.176.000,00
401.07.05.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	4.661.000,00
401.07.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	115.926.000,00
401.07.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10.407.000,00
401.07.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.505.000,00
401.07.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	28.001.000,00
401.07.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	32.679.000,00
401.07.05.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	3.940.000,00
401.07.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	13.528.000,00
401.07.05.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	6.786.000,00
401.07.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.07.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7.390.000,00
401.07.05.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	31.080.000,00
401.07.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	12.005.000,00
401.07.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	11.616.000,00
401.07.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	8.541.000,00
401.07.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.958.000,00
401.07.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	37.545.000,00
401.07.05.15	Program Pengembangan data/informasi	7.034.000,00
401.07.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.840.000,00
401.07.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	15.120.000,00
401.07.06	Kelurahan Wates	1.148.869.000,00
401.07.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.303.000,00
401.07.06.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.396.000,00
401.07.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.000.000,00
401.07.06.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	5.000.000,00
401.07.06.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	5.000.000,00
401.07.06.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.000.000,00
401.07.06.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	307.800.000,00
401.07.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.670.000,00
401.07.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	216.326.000,00
401.07.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	28.153.000,00
401.07.06.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.162.000,00
401.07.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	7.000.000,00
401.07.06.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	5.915.000,00
401.07.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70.000.000,00
401.07.06.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6.078.000,00

401.07.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	10.290.000,00
401.07.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	29.016.000,00
401.07.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	45.135.000,00
401.07.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	14.415.000,00
401.07.06.15	Program Keluarga Berencana	4.540.000,00
401.07.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,00
401.07.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.600.000,00
401.07.06.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	25.000.000,00
401.07.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	74.455.000,00
401.07.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	7.656.000,00
401.07.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2.690.000,00
401.07.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	122.978.000,00
401.07.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	46.765.000,00
401.07.06.15	Program Pengembangan data/informasi	7.190.000,00
401.07.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.336.000,00
401.07.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	35.000.000,00
402	Pengawasan	10.665.741.000,00
402.01	Inspektorat	10.665.741.000,00
402.01.01	Inspektorat	10.665.741.000,00
402.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	264.873.000,00
402.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.447.929.000,00
402.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.787.000,00
402.01.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.369.397.000,00
402.01.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	186.444.000,00
402.01.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	104.065.000,00
402.01.01.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	247.246.000,00
403	Perencanaan	6.981.986.000,00
403.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.981.986.000,00
403.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.981.986.000,00
403.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	4.545.000,00
403.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	693.632.000,00
403.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	244.156.000,00
403.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.349.000,00
403.01.01.15	Program Pengembangan data/informasi	57.000.000,00
403.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	113.134.000,00
403.01.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	124.752.000,00
403.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	2.486.676.000,00
403.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	915.468.000,00
403.01.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	801.386.000,00
403.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	1.455.888.000,00
404	Keuangan	19.036.551.000,00
404.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.036.551.000,00
404.01.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.036.551.000,00
404.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	147.258.000,00
404.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.081.329.000,00
404.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	696.803.000,00
404.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	175.501.000,00
404.01.01.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.125.562.000,00
404.01.01.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.313.593.000,00
404.01.01.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.496.505.000,00
404.01.02	PPKD	0,00
405	Kepegawaian	7.963.568.000,00
405.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.963.568.000,00
405.01.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.963.568.000,00
405.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.571.000,00
405.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	393.237.000,00
405.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.605.000,00
405.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	135.410.000,00
405.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.763.000,00
405.01.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.892.837.000,00
405.01.01.15	Program Pendidikan Kedinasan	1.503.478.000,00
405.01.01.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.777.667.000,00
407	Penelitian dan Pengembangan	2.565.468.000,00
407.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.565.468.000,00
407.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.565.468.000,00
407.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.000.000,00

407.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.155.000,00
407.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	162.833.000,00
407.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.236.000,00
407.01.01.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	623.810.000,00
407.01.01.16	Program Penelitian dan Pengkajian	567.063.000,00
407.01.01.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	27.572.000,00
407.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi	50.211.000,00
407.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	559.588.000,00



LAMPIRAN II
NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I

NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Urusan Pemerintah Daerah
1	2
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
101	Pendidikan
101,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
101.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
101.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
101.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
101.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal
101.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
101.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
101.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
101.01.01.25	Program Pendidikan Berkelanjutan
101.01.01.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
101.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
101.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
101.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
101.01.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
101.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
101.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
102	Kesehatan
102,01	Dinas Kesehatan
102.01.01	Dinas Kesehatan
102.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
102.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
102.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
102.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
102.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
102.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
102.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
102.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
102.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
102.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
102.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
102.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
102.01.01.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
102.01.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
102.01.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
102.01.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
102.01.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
102.01.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
102,02	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
102.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang
102.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
102.02.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
103.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
103.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
103.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
103.01.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
103.01.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

103.01.01.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
103.01.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
103.01.01.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
103.01.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
103.01.01.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
103.01.01.33	Program pengawasan jasa konstruksi
103.01.01.51	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
103.01.01.52	Program Perencanaan Tata Ruang
103.01.01.53	Program Pemanfaatan Ruang
103.01.01.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
103.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
104,01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
104.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
104.01.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
104.01.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
104.01.01.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan
104.01.01.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari
104.01.01.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara
104.01.01.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan
104.01.01.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara
104.01.01.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates
104.01.01.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari
104.01.01.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari
104.01.01.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara
104.01.01.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan
104.01.01.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo
104.01.01.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban
104.01.01.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara
104.01.01.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang
104.01.01.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang
104.01.01.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan
104.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
104.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
104.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
104.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
104.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
104.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan
104.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan
104.01.01.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
104.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
104.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
105,01	Satuan Polisi Pamong Praja
105.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja
105.01.01.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
105.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
105.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
105.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
105.01.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
105.01.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
105.01.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
105.01.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
105.01.01.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
105,02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
105.02.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
105.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
105.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
105.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
105.02.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
105.02.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
105.02.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
105.02.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
105.02.01.21	Program pendidikan politik masyarakat
105.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

106	Sosial
106,01	Dinas Sosial
106.01.01	Dinas Sosial
106.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
106.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
106.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
106.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
106.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
106.01.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
106.01.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
106.01.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
106.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
201	Tenaga Kerja
201,01	Dinas Tenaga Kerja
201.01.01	Dinas Tenaga Kerja
201.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
201.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
201.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
201.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
201.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
201.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
201.01.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
201.01.01.17	Program Transmigrasi Regional
205	Lingkungan Hidup
205,01	Dinas Lingkungan Hidup
205.01.01	Dinas Lingkungan Hidup
205.01.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman
205.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
205.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
205.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
205.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
205.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
205.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
205.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
205.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
205.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
205.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
205.01.01.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
205.01.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
205.01.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
206	Administrasi Kependudukan dan Capil
206,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
206.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
206.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
206.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
206.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
206.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
207	Pemberdayaan Masyarakat Desa
207,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
207.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
207.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
207.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
207.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
207.01.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
207.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
207.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
207.01.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
207.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
207.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
207.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
207.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
207.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

207.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
207.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
207.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
207.01.01.15	Program Keluarga Berencana
207.01.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
207.01.01.17	Program pelayanan kontrasepsi
207.01.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
207.01.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
207.01.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
207.01.01.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
209	Perhubungan
209,01	Dinas Perhubungan
209.01.01	Dinas Perhubungan
209.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
209.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
209.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
209.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
209.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
209.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
209.01.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
209.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
209.01.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
209.01.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
210	Komunikasi dan Informatika
210,01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
210.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
210.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
210.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
210.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
210.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
210.01.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
210.01.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
210.01.01.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika
210.01.01.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
210.01.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
210.01.01.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi
210.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
212	Penanaman Modal
212,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
212.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
212.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
212.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
212.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
212.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
212.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
212.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
212.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
212.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
212.01.01.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
212.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
213	Kepemudaan dan Olah Raga
213,01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
213.01.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
213.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
213.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
213.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
213.01.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
213.01.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
213.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
213.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
213.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
213.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan
213.01.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
217	Perpustakaan
217,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
217.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

217.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
217.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
217.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
217.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
217.01.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
217.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
217.01.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
217.01.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
3	Urusan Pilihan
303	Pertanian
303,01	Dinas Pertanian dan Pangan
303.01.01	Dinas Pertanian dan Pangan
303.01.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
303.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
303.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
303.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan
303.01.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
303.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
303.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
303.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
303.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
303.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
303.01.01.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
303.01.01.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
303.01.01.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
303.01.01.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
303.01.01.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
303.01.01.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan
303.01.01.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
303.01.01.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
303.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
307	Perindustrian
307,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
307.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
307.01.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
307.01.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
307.01.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
307.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
307.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
307.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
307.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
307.01.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
307.01.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
307.01.01.20	Program Pengelolaan Pasar
307.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
307.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
307.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
307.01.01.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
307.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
307.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
307.01.01.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
401	Administrasi Pemerintahan
401,01	DPRD
401.01.01	DPRD
401,02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
401.02.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
401,03	Sekretariat Daerah
401.03.01	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
401.03.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.03.01.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum
401.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
401.03.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
401.03.01.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

401.03.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
401.03.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
401.03.02	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
401.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.02.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
401.03.02.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
401.03.02.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
401.03.02.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
401.03.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.03.03	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
401.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.03.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
401.03.04	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian
401.03.04.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
401.03.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.03.04.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
401.03.04.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
401.03.04.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
401.03.04.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
401.03.04.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah
401.03.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.04.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
401.03.04.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
401.03.05	Sekretariat Daerah - Bagian Pembangunan
401.03.05.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
401.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.05.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
401.03.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
401.03.05.16	Program Kerjasama Pembangunan
401.03.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.03.05.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
401.03.06	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
401.03.06.18	Program Pendidikan Non Formal
401.03.06.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.03.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.03.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.03.06.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
401.03.06.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama
401.03.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
401.03.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
401.03.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
401.03.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.03.06.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.07	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
401.03.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.03.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.03.07.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
401.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.07.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
401.03.07.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
401.03.08	Sekretariat Daerah - Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan
401.03.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.03.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
401.03.09	Sekretariat Daerah - Bagian Umum
401.03.09.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.03.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.03.09.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

401.03.09.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
401,04	Sekretariat DPRD
401.04.01	Sekretariat DPRD
401.04.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.04.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
401.04.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
401.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
401.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
401.04.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
401.04.01.15	Program Pengembangan data/informasi
401,05	Kecamatan Magelang Selatan
401.05.01	Kecamatan Magelang Selatan
401.05.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.01.18	Program Pendidikan Non Formal
401.05.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.05.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
401.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.05.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
401.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
401.05.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan
401.05.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
401.05.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
401.05.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.05.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
401.05.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
401.05.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.02	Kelurahan Jurangombo Selatan
401.05.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.05.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
401.05.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.02.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan
401.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.05.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.02.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.05.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.02.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah

401.05.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.05.03	Kelurahan Jurangombo Utara
401.05.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.05.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.05.03.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara
401.05.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.03.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.05.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.05.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.05.03.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
401.05.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.03.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.05.04	Kelurahan Magersari
401.05.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.05.04.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
401.05.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.05.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.05.04.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari
401.05.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.05.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.04.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.05.04.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
401.05.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.04.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.05.05	Kelurahan Rejowinangun Selatan
401.05.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.05.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
401.05.05.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
401.05.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.05.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
401.05.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

401.05.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.05.05.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.05.05.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan
401.05.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.05.05.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.05.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.05.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.05.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.05.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.05.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.05.16	Program Kerjasama Pembangunan
401.05.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.05.06	Kelurahan Tidar Selatan
401.05.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.06.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
401.05.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.06.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
401.05.06.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan
401.05.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.05.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.06.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.05.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.06.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.05.07	Kelurahan Tidar Utara
401.05.07.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.05.07.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
401.05.07.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.05.07.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara
401.05.07.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.05.07.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.05.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.05.07.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.05.07.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.05.07.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.05.07.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.05.07.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan

401.05.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.05.07.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.05.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.05.07.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.05.07.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.05.07.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.05.07.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.05.07.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.05.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.05.07.15	Program Pengembangan data/informasi
401.05.07.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.05.07.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.06	Kecamatan Magelang Tengah
401.06.01	Kecamatan Magelang Tengah
401.06.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.01.18	Program Pendidikan Non Formal
401.06.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
401.06.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.01.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
401.06.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.06.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD
401.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
401.06.01.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
401.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.02	Kelurahan Cacaban
401.06.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.02.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban
401.06.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.02.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.06.02.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

401.06.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.02.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.06.03	Kelurahan Gelangan
401.06.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.03.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan
401.06.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.03.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.03.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.03.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.06.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.03.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.06.04	Kelurahan Kemirirejo
401.06.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.04.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo
401.06.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.04.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.04.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.04.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.06.04.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.04.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
401.06.04.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan

401.06.05	Kelurahan Magelang
401.06.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.05.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang
401.06.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.05.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.05.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.06.05.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.05.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.06.06	Kelurahan Panjang
401.06.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.06.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.06.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.06.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang
401.06.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.06.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.06.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.06.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.06.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.06.06.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.06.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.06.07	Kelurahan Rejowinangun Utara
401.06.07.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.06.07.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.06.07.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.06.07.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.06.07.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara

401.06.07.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.06.07.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.06.07.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.06.07.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.06.07.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.06.07.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.06.07.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.06.07.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.06.07.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.06.07.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.06.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.06.07.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.06.07.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.06.07.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.06.07.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.06.07.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
401.06.07.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.06.07.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.06.07.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.06.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.06.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.06.07.15	Program Pengembangan data/informasi
401.06.07.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.06.07.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401,07	Kecamatan Magelang Utara
401.07.01	Kecamatan Magelang Utara
401.07.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.01.18	Program Pendidikan Non Formal
401.07.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
401.07.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
401.07.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.07.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.07.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.07.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.07.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan
401.07.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
401.07.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.07.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
401.07.01.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.02	Kelurahan Kedungsari
401.07.02.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.07.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.07.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.07.02.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari
401.07.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.02.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.07.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

401.07.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.07.02.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.07.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.07.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.07.02.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.02.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.07.02.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.02.15	Program Keluarga Berencana
401.07.02.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.02.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.07.02.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.07.02.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.02.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.02.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.02.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.02.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.07.03	Kelurahan Kramat Selatan
401.07.03.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.03.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.07.03.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.03.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.03.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.07.03.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.07.03.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong
401.07.03.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan
401.07.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.03.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.03.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.07.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.07.03.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.07.03.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.07.03.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.07.03.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.03.15	Program Keluarga Berencana
401.07.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.03.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.07.03.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.07.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.03.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.03.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.03.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.03.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.07.04	Kelurahan Kramat Utara
401.07.04.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.07.04.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.04.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.04.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.07.04.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.07.04.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong
401.07.04.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara
401.07.04.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.04.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.04.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.04.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.07.04.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.07.04.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.07.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

401.07.04.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.07.04.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.07.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.04.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.07.04.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.04.15	Program Keluarga Berencana
401.07.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.04.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.07.04.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.07.04.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.04.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.04.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.04.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.04.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.04.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.07.05	Kelurahan Potrobangsari
401.07.05.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.05.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.07.05.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.05.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.05.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.07.05.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.07.05.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari
401.07.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.05.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.07.05.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.07.05.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.07.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.07.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
401.07.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.07.05.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.07.05.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan
401.07.05.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.05.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
401.07.05.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.05.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.07.05.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
401.07.05.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.05.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.05.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.05.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.05.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan
401.07.06	Kelurahan Wates
401.07.06.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
401.07.06.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401.07.06.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
401.07.06.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
401.07.06.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
401.07.06.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
401.07.06.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates
401.07.06.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
401.07.06.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
401.07.06.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
401.07.06.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
401.07.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
401.07.06.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
401.07.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
401.07.06.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

401.07.06.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
401.07.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
401.07.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
401.07.06.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan
401.07.06.15	Program Keluarga Berencana
401.07.06.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
401.07.06.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
401.07.06.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
401.07.06.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
401.07.06.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
401.07.06.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
401.07.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
401.07.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
401.07.06.15	Program Pengembangan data/informasi
401.07.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah
401.07.06.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan
402	Pengawasan
402,01	Inspektorat
402.01.01	Inspektorat
402.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
402.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
402.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
402.01.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
402.01.01.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
402.01.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
402.01.01.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal
403	Perencanaan
403,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
403.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
403.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
403.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
403.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
403.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
403.01.01.15	Program Pengembangan data/informasi
403.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan
403.01.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
403.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah
403.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
403.01.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
403.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
404	Keuangan
404,01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
404.01.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
404.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
404.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
404.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
404.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
404.01.01.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
404.01.01.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
404.01.01.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
404.01.02	PPKD
405	Kepegawaian
405,01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
405.01.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
405.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
405.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
405.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
405.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
405.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
405.01.01.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
405.01.01.15	Program Pendidikan Kedinasan
405.01.01.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
407	Penelitian dan Pengembangan
407,01	Badan Penelitian dan Pengembangan
407.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan
407.01.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

407.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
407.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
407.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
407.01.01.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi
407.01.01.16	Program Penelitian dan Pengkajian
407.01.01.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan
407.01.01.18	Program Perlindungan Produk Teknologi dan Inovasi
407.01.01.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan